

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Auditing

2.1.1 Pengertian Auditing

Auditing merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti audit secara objektif. Tujuan dari proses tersebut adalah untuk menilai tingkat kesesuaian antara informasi yang diperiksa dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan, kemudian menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pelaksanaan audit harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi serta bersikap independen agar hasil audit dapat dipercaya.

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley (2020), audit adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Auditor wajib memiliki kompetensi dan independensi dalam melaksanakan audit sehingga hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (2021), audit merupakan suatu proses yang dilakukan oleh auditor independen untuk memperoleh keyakinan memadai (*reasonable assurance*) mengenai apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut auditor memberikan opini

mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa auditing merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis, objektif, dan independen untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat sebagai dasar dalam memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Hasil audit diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan para pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan ekonomi.

2.1.2 Tujuan Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disusun dan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor mengumpulkan serta mengevaluasi bukti yang memadai sehingga dapat memberikan opini secara independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan (Priandana, 2023).

Menurut Standar Audit (SA) 200 Tujuan audit adalah memberikan keyakinan yang memadai kepada para pengguna laporan keuangan mengenai keandalan informasi yang disajikan. Keyakinan tersebut diwujudkan melalui opini auditor mengenai apakah laporan keuangan telah disusun dan disajikan secara material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Pada umumnya, dalam kerangka pelaporan keuangan bertujuan umum, auditor memberikan pendapat

mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dalam semua aspek yang material sesuai dengan standar yang digunakan. Untuk dapat menyampaikan opini tersebut, audit harus dilaksanakan berdasarkan Standar Audit (SA) serta mematuhi ketentuan etika profesi yang berlaku (Suraharta, 2024).

Selain memberikan opini, audit juga berperan dalam meningkatkan kredibilitas informasi keuangan, mengidentifikasi kesalahan maupun indikasi kecurangan, serta memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk memperbaiki sistem pengendalian internal. Dengan demikian, hasil audit menjadi sumber informasi yang andal bagi investor, kreditor, pemerintah, maupun pihak berkepentingan lainnya dalam mengambil keputusan ekonomi.

2.1.3 Standar Audit

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2025), Standar Audit (SA) merupakan pedoman yang digunakan auditor dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan. Standar tersebut disusun untuk memastikan setiap tahapan pemeriksaan dilakukan secara konsisten, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan profesi. SA 200 sampai dengan SA 810 dikelompokkan ke dalam enam kelompok utama, yaitu: (1) Prinsip Umum dan Tanggung Jawab Auditor, (2) Penilaian Risiko dan Respons terhadap Risiko yang Telah Dinilai, (3) Bukti Audit, (4) Penggunaan Pekerjaan Pihak Lain, (5) Kesimpulan Audit dan Pelaporan, serta (6) Area Khusus.

Standar Audit yang menjadi acuan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan dikelompokkan sebagai berikut :

1. Prinsip Umum dan Tanggung Jawab Auditor

- a. SA 200 : Tujuan Keseluruhan Auditor Independen
- b. SA 210 : Persetujuan Perikatan Audit
- c. SA 220 : Pengendalian Mutu Audit
- d. SA 230 : Dokumentasi Audit
- e. SA 240 : Tanggung Jawab Auditor atas Kecurangan
- f. SA 250 : Pertimbangan Peraturan Perundang-undangan
- g. SA 260 : Komunikasi dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola
- h. SA 265 : Komunikasi Defisiensi Pengendalian Internal

2. Penilaian Risiko dan Respons terhadap Risiko

- a. SA 300 : Perencanaan Audit
- b. SA 315 : Identifikasi dan Penilaian Risiko Salah Saji Material
- c. SA 320 : Materialitas dalam Audit
- d. SA 330 : Respons Auditor terhadap Risiko yang Dinilai
- e. SA 402 : Pertimbangan Audit atas Organisasi Jasa
- f. SA 450 : Evaluasi Salah Saji yang Ditemukan

3. Bukti Audit

- a. SA 500 : Bukti Audit
- b. SA 501 : Bukti Audit untuk Pertimbangan Khusus
- c. SA 505 : Konfirmasi Eksternal
- d. SA 510 : Perikatan Audit Tahun Pertama

- e. SA 520 : Prosedur Analitis
- f. SA 530 : Sampling Audit
- g. SA 540 : Audit Estimasi Akuntansi
- h. SA 550 : Pihak Berelasi
- i. SA 560 : Peristiwa Setelah Tanggal Laporan Keuangan
- j. SA 570 : Kelangsungan Usaha
- k. SA 580 : Representasi Tertulis

4. Penggunaan Pekerjaan Pihak Lain

- a. SA 600 : Audit Laporan Keuangan Grup
- b. SA 610 : Penggunaan Pekerjaan Auditor Internal
- c. SA 620 : Penggunaan Pekerjaan Pakar Auditor

5. Kesimpulan Audit dan Pelaporan

- a. SA 700 : Perumusan Opini dan Pelaporan Audit
- b. SA 701 : Pengomunikasian Hal Audit Utama
- c. SA 705 : Modifikasi Opini Auditor
- d. SA 706 : Paragraf Penekanan Suatu Hal
- e. SA 710 : Informasi Komparatif
- f. SA 720 : Tanggung Jawab atas Informasi Lain

6. Area Khusus

- a. SA 800 : Audit atas Kerangka Bertujuan Khusus
- b. SA 805 : Audit atas Unsur atau Akun Tertentu
- c. SA 810 : Pelaporan atas Ikhtisar Laporan Keuangan

Penerapan Standar Audit menjadi landasan bagi auditor dalam melaksanakan pemeriksaan secara profesional dan konsisten. Kepatuhan

terhadap ketentuan tersebut mendukung kualitas proses audit, meningkatkan keandalan hasil pemeriksaan, serta menghasilkan opini yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para pengguna laporan keuangan.

2.2 Prosedur Audit Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Prosedur Audit

Prosedur audit merupakan serangkaian langkah pemeriksaan yang dirancang untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai dasar dalam menarik kesimpulan atas laporan keuangan. Penerapannya dilakukan secara sistematis agar proses pemeriksaan berjalan konsisten serta sesuai dengan ketentuan dan standar profesi yang berlaku (Suryaningsih, Elfariha, Puji, Sastika, & Putri, 2026).

Dalam pelaksanaannya, auditor menggunakan berbagai teknik pemeriksaan, antara lain inspeksi, observasi, konfirmasi eksternal, penghitungan ulang, pelaksanaan kembali (*reperformance*), prosedur analitis, dan inkuiri. Kombinasi teknik tersebut bertujuan memperoleh bukti yang memadai sehingga kesimpulan yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat sesuai dengan standar profesional.

2.2.2 Tahapan Prosedur Audit Laporan Keuangan

Pelaksanaan audit laporan keuangan dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Setiap tahapan dirancang untuk membantu auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat sehingga dapat memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Adapun tahapan prosedur audit laporan keuangan meliputi (Kartolo, 2019):

1. Penerimaan Perikatan Audit

Tahap awal audit dimulai dengan penerimaan perikatan dari klien. Pada tahap ini auditor mempertimbangkan independensi, kompetensi, integritas klien, serta risiko perikatan sebelum menyepakati penugasan audit. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, auditor dan klien menyepakati ruang lingkup pekerjaan melalui surat perikatan audit (engagement letter).

2. Perencanaan Audit

Setelah perikatan diterima, auditor menyusun rencana audit dengan memperoleh pemahaman mengenai kegiatan usaha, lingkungan bisnis, sistem pengendalian internal, serta mengidentifikasi risiko salah saji material. Informasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan strategi audit, materialitas, dan prosedur audit yang akan dilaksanakan.

3. Pelaksanaan Prosedur Audit

Pada tahap ini auditor melaksanakan prosedur audit untuk memperoleh bukti audit yang memadai. Prosedur yang dilakukan dapat berupa pengujian pengendalian (test of controls) dan prosedur substantif. Dalam pelaksanaannya auditor menggunakan berbagai teknik, seperti inspeksi dokumen, observasi, konfirmasi eksternal, penghitungan ulang (recalculation), pelaksanaan kembali (reperformance), prosedur analitis, dan permintaan keterangan (inquiry).

4. Evaluasi Bukti Audit

Setelah seluruh prosedur audit selesai dilakukan, auditor mengevaluasi bukti audit yang telah diperoleh untuk menilai apakah bukti tersebut telah cukup dan tepat dalam mendukung kesimpulan audit. Auditor juga mempertimbangkan hasil temuan audit, salah saji yang ditemukan, serta dampaknya terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.

5. Penyusunan Laporan Audit

Tahap terakhir adalah penyusunan laporan auditor independen. Auditor menyusun opini berdasarkan hasil evaluasi seluruh bukti audit yang telah diperoleh. Opini tersebut menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prosedur audit terdiri atas berbagai teknik pemeriksaan yang saling melengkapi dalam memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Penerapan setiap teknik disesuaikan dengan tujuan pemeriksaan sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan kesimpulan dan pemberian opini atas laporan keuangan.

2.3 Bukti Audit

2.3.1 Pengertian Bukti Audit

Bukti audit merupakan seluruh informasi yang dikumpulkan auditor selama proses pemeriksaan untuk mendukung penilaian terhadap kewajaran laporan keuangan. Informasi tersebut menjadi dasar dalam

menyusun kesimpulan serta menentukan opini yang akan diberikan atas hasil pemeriksaan.

Menurut Arens dkk. (2019), bukti audit (*audit evidence*) adalah seluruh informasi yang digunakan auditor untuk menilai apakah informasi yang diaudit telah disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Informasi tersebut dapat berupa data yang mendukung maupun yang bertentangan dengan asersi manajemen sehingga menjadi dasar dalam pemberian opini atas laporan keuangan.

Sementara itu, Standar Audit (SA) 500 menjelaskan bahwa bukti audit merupakan seluruh informasi yang digunakan auditor dalam menarik kesimpulan sebagai dasar pemberian opini. Informasi tersebut dapat berasal dari catatan akuntansi maupun sumber lain yang berkaitan dengan proses pemeriksaan. Kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh akan memengaruhi tingkat keyakinan auditor terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Sebaliknya, bukti yang tidak memadai dapat membatasi auditor dalam memberikan keyakinan yang cukup.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bukti audit merupakan dasar utama yang digunakan auditor dalam mengevaluasi kewajaran laporan keuangan. Oleh karena itu, kualitas, kecukupan, dan ketepatan informasi yang diperoleh sangat menentukan keandalan hasil pemeriksaan.

2.3.2 Pentingnya Bukti Audit

Menurut Standar Audit (SA) 500, Bukti audit memiliki peranan penting karena menjadi dasar bagi auditor dalam menyusun kesimpulan serta memberikan opini atas laporan keuangan. Informasi yang memadai dan relevan akan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan sekaligus memberikan keyakinan kepada para pengguna laporan keuangan terhadap keandalan informasi yang disajikan (Profesional, n.d.).

Selain mendukung penyusunan opini, bukti audit juga berfungsi sebagai dokumentasi atas seluruh prosedur yang telah dilaksanakan selama proses pemeriksaan. Dokumentasi tersebut menjadi bagian dari kertas kerja pemeriksaan yang digunakan dalam proses penelaahan, pengendalian mutu, serta sebagai bukti pendukung apabila di kemudian hari timbul permasalahan yang berkaitan dengan hasil audit (Tamami et al., 2025).

Menurut Standar Audit (SA) 500, bukti audit terdiri atas beberapa jenis yaitu :

1. Inspeksi

Inspeksi merupakan pemeriksaan terhadap catatan, dokumen, baik yang berasal dari internal maupun eksternal, dalam bentuk cetak, elektronik, atau media lainnya, serta pemeriksaan fisik atas suatu aset. Keandalan bukti yang diperoleh bergantung pada sumber dokumen dan efektivitas pengendalian internal yang diterapkan oleh entitas. Salah satu penerapannya adalah memeriksa dokumen yang menunjukkan adanya otorisasi suatu transaksi.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung suatu proses atau prosedur yang dilaksanakan oleh pihak lain. Contohnya adalah pengamatan terhadap pelaksanaan penghitungan persediaan maupun penerapan pengendalian internal. Bukti yang diperoleh hanya menggambarkan kondisi pada saat pengamatan dilakukan sehingga memiliki keterbatasan pada periode tersebut.

3. Konfirmasi Eksternal

Konfirmasi eksternal merupakan bukti yang diperoleh melalui tanggapan tertulis secara langsung dari pihak ketiga, baik dalam bentuk dokumen fisik maupun elektronik. Teknik ini umumnya digunakan untuk memverifikasi saldo akun, transaksi, atau ketentuan dalam suatu perjanjian. Selain itu, konfirmasi juga dapat digunakan untuk memastikan tidak adanya kondisi tertentu yang berpotensi memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan, seperti *side agreement* yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan.

4. Penghitungan Ulang

Penghitungan ulang (*recalculation*) merupakan pemeriksaan kembali terhadap ketepatan perhitungan matematis yang terdapat dalam dokumen maupun catatan akuntansi. Kegiatan ini dapat dilakukan secara manual maupun dengan bantuan perangkat elektronik.

5. Pelaksanaan Kembali

Pelaksanaan kembali (*reperformance*) adalah kegiatan mengulang secara independen prosedur atau pengendalian yang sebelumnya telah diterapkan oleh entitas. Tujuannya untuk memastikan bahwa pengendalian tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya.

6. Prosedur Analitis

Prosedur analitis dilakukan dengan mengevaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan yang logis antara data keuangan dan nonkeuangan. Selain itu, auditor menganalisis fluktuasi maupun hubungan yang tidak konsisten dengan nilai yang diperkirakan sebelumnya sebagai dasar untuk menentukan area yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

7. Inkuiri

Inkuiri merupakan proses memperoleh informasi dari pihak yang memiliki pengetahuan mengenai kondisi keuangan maupun operasional entitas. Teknik ini dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis dan umumnya digunakan sebagai pelengkap prosedur lainnya. Oleh karena itu, setiap informasi yang diperoleh perlu dievaluasi serta didukung oleh bukti lain yang memadai.

2.4 Opini Audit

Auditor merupakan pihak eksternal yang bersifat independen dan bertugas melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan.

Setelah proses pemeriksaan dilakukan, auditor memberikan opini mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut. Penilaian kewajaran mencakup hal-hal yang material, termasuk posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas perusahaan yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Menurut Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 29 atau SA Seksi 508, auditor dapat memberikan beberapa jenis opini berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan. Jenis-jenis opini tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian

Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Penyajian tersebut mencakup posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas entitas dan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

b. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan

Dalam kondisi tertentu, auditor dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan menambahkan paragraf penjelasan dalam laporan audit. Penambahan penjelasan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih jelas mengenai kondisi tertentu yang berkaitan dengan laporan keuangan.

Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan auditor menambahkan paragraf penjelasan antara lain:

1. Opini auditor menggunakan atau didasarkan pada laporan auditor independen lainnya.
2. Diperlukan penjelasan tambahan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap laporan keuangan dalam kondisi tertentu, termasuk ketika terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
3. Auditor menemukan adanya kondisi yang sebelumnya dianggap menyimpang, tetapi setelah mempertimbangkan rencana dan tindakan manajemen, auditor menilai bahwa tindakan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif sehingga memengaruhi pemberian opini.
4. Terdapat perubahan yang material dalam penerapan prinsip akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya.
5. Laporan auditor berkaitan dengan laporan keuangan komparatif. Informasi keuangan kuartalan tertentu yang diwajibkan oleh BAPEPAM-LK tidak disajikan dalam laporan keuangan.
6. Terdapat informasi tambahan yang diwajibkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan, atau penyajiannya tidak sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga auditor tidak dapat menyelesaikan prosedur audit yang diperlukan atas informasi tersebut.
7. Terdapat informasi lain yang disajikan bersama laporan keuangan auditan yang secara material tidak konsisten dengan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan.

c. Pendapat Wajar dengan Pengecualian

Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan ketika auditor menilai bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar dalam hal yang material, termasuk posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Namun, terdapat kondisi atau hal tertentu yang dikecualikan dan memberikan pengaruh terhadap penyajian laporan keuangan.

Opini wajar dengan pengecualian dapat diberikan dalam beberapa kondisi, yaitu:

1. Auditor tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten atau terdapat pembatasan terhadap ruang lingkup pemeriksaan. Kondisi tersebut menyebabkan auditor tidak dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian, tetapi keadaan yang dihadapi belum cukup untuk membuat auditor menyatakan tidak memberikan pendapat.
2. Auditor menemukan adanya penyimpangan dalam penyajian laporan keuangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan penyimpangan tersebut mempunyai dampak material. Meskipun demikian, kondisi tersebut belum menyebabkan auditor memberikan opini tidak wajar.

d. Pendapat Tidak Wajar

Pendapat tidak wajar diberikan apabila auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan tidak menggambarkan kondisi keuangan entitas secara wajar dan terdapat penyimpangan material dari prinsip akuntansi yang

berlaku umum di Indonesia. Penyimpangan tersebut dapat memengaruhi penyajian posisi keuangan, hasil usaha, maupun arus kas entitas.

e. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat

Pernyataan tidak memberikan pendapat diberikan ketika auditor tidak memperoleh dasar yang memadai untuk menarik kesimpulan mengenai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dalam kondisi tersebut, auditor tidak dapat menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Oleh karena itu, laporan auditor harus menjelaskan secara jelas alasan dan kondisi yang menyebabkan auditor tidak dapat memberikan pendapat.

2.5 Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)

2.5.1 Pengertian Kertas Kerja Pemeriksaan

Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) merupakan dokumen yang disusun selama proses audit sebagai bukti bahwa seluruh tahapan pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit yang berlaku. Dokumen ini memuat perencanaan, pelaksanaan prosedur, bukti yang diperoleh, hasil pengujian, serta kesimpulan yang menjadi dasar dalam penyusunan opini atas laporan keuangan (Vica & Budiwitjaksono, 2025).

Menurut Koerniawan (2021), dalam (Vica & Budiwitjaksono, 2025) kertas kerja pemeriksaan merupakan bukti pelaksanaan audit yang memuat prosedur yang telah dilakukan, pengujian yang dilaksanakan, informasi yang diperoleh, serta berbagai pertimbangan yang diambil selama proses pemeriksaan. Selain berfungsi sebagai dokumentasi, KKP

juga menunjukkan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar profesional. Apabila di kemudian hari terjadi sengketa atau permasalahan yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan, dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai bukti pendukung atas pekerjaan auditor.

Seiring perkembangan teknologi informasi, penyusunan KKP yang sebelumnya dilakukan secara manual kini telah beralih ke sistem digital. Salah satu aplikasi yang mendukung proses tersebut adalah *Audit Tools and Linked Archive System* (ATLAS). Penggunaan aplikasi ini membantu penyusunan, pengelolaan, dan penyimpanan dokumentasi secara lebih terstruktur sehingga meningkatkan efisiensi sekaligus kualitas pelaksanaan audit.

2.5.2 Tujuan Kertas Kerja Pemeriksaan

Kertas Kerja Pemeriksaan memiliki peranan penting dalam setiap penugasan audit karena menjadi dokumentasi atas seluruh proses yang telah dilaksanakan. Selain mendukung penyusunan opini auditor, dokumen ini juga berfungsi sebagai bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan standar profesi.

Menurut Ningrum (2021), dalam (Pusat, 2014) tujuan penyusunan KKP meliputi :

1. Mendukung opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan.
2. Menjadi bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan standar profesional akuntan publik.
3. Menjadi referensi apabila terdapat permintaan informasi dari pihak pajak, perbankan, maupun klien.

4. Menjadi dasar dalam mengevaluasi kinerja anggota tim audit, mulai dari asisten hingga partner.
5. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan audit pada periode berikutnya.

2.5.3 Isi Kertas Kerja Pemeriksaan

Menurut Standar Audit (SA) 230 Kertas Kerja Pemeriksaan memuat seluruh informasi yang berkaitan dengan proses audit. Penyusunannya dilakukan secara sistematis agar memudahkan pelaksanaan, penelaahan, serta pengarsipan dokumen.

Secara umum isi kertas kerja pemeriksaan meliputi (Suraharta, 2024) :

1. Informasi Klien

Bagian ini berisi identitas entitas yang diaudit, seperti nama perusahaan, alamat, bidang usaha, periode laporan keuangan, serta informasi umum lainnya yang diperlukan selama proses audit.

2. Program Audit

Program audit merupakan rencana kerja yang memuat tujuan, ruang lingkup, prosedur yang akan dilaksanakan, serta jadwal pemeriksaan. Dokumen ini menjadi pedoman bagi auditor dalam melaksanakan setiap tahapan audit.

3. Penilaian Risiko Audit

Bagian ini berisi hasil identifikasi dan penilaian terhadap risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Hasil penilaian tersebut menjadi dasar dalam menentukan prosedur yang akan diterapkan.

4. Pelaksanaan Prosedur Audit

Bagian ini mendokumentasikan seluruh prosedur yang telah dilakukan, seperti inspeksi, observasi, konfirmasi, wawancara, penghitungan ulang, pelaksanaan kembali (*reperformance*), dan prosedur analitis.

5. Bukti Audit

Seluruh bukti yang diperoleh selama pemeriksaan didokumentasikan secara lengkap sebagai dasar dalam penyusunan kesimpulan audit.

6. Temuan Audit

Bagian ini memuat hasil pemeriksaan yang menunjukkan adanya penyimpangan, kelemahan pengendalian internal, maupun kondisi lain yang memerlukan tindak lanjut dari manajemen.

7. Kesimpulan Auditor

Bagian terakhir berisi kesimpulan yang disusun berdasarkan seluruh bukti yang telah diperoleh dan menjadi dasar dalam penyusunan laporan auditor independen.

2.5.4 Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan Berbasis Teknologi

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara penyusunan dokumentasi audit. Jika sebelumnya dilakukan secara manual dengan berbagai dokumen yang terpisah, saat ini proses tersebut didukung oleh aplikasi berbasis teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Salah satu aplikasi yang digunakan adalah *Audit Tools and Linked Archive System* (ATLAS), yang

membantu penyusunan dokumentasi secara sistematis, terstruktur, dan sesuai dengan Standar Audit (Vica & Budiwitjaksono, 2025).

Melalui aplikasi tersebut, seluruh tahapan audit dapat terdokumentasi dalam satu sistem yang saling terintegrasi, mulai dari tahap pra-perikatan, penilaian risiko, pelaksanaan prosedur, hingga penyusunan laporan auditor independen. Kondisi ini juga mempermudah proses supervisi dan penelaahan karena setiap tahapan dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan.

Selain meningkatkan efisiensi waktu, penerapan sistem berbasis teknologi membantu meminimalkan kesalahan dalam penginputan data, memperkuat pengendalian dokumentasi, serta meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan. Oleh karena itu, penggunaan ATLAS menjadi salah satu bentuk transformasi digital dalam profesi akuntan publik yang mendukung pelaksanaan audit secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel (Vica & Budiwitjaksono, 2025).

2.6 *Audit Tools and Linked Archive System (ATLAS)*

2.6.1 *Pengertian Audit Tools and Linked Archive System (ATLAS)*

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan dalam pelaksanaan audit, khususnya pada penyusunan dokumentasi pemeriksaan. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi tersebut adalah penggunaan *Audit Tools and Linked Archive System (ATLAS)* sebagai media penyusunan kertas kerja pemeriksaan yang terstruktur dan terintegrasi. ATLAS merupakan aplikasi berbasis *Microsoft Excel* yang dikembangkan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia bekerja sama dengan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Aplikasi ini dirancang sebagai alat bantu dalam pelaksanaan audit berbasis risiko (*risk-based audit*) sesuai dengan Standar Audit (SA) dan *International Standards on Auditing* (ISA) (Sudiman & Dwiharyadi, 2025).

Selain mendukung penyusunan kertas kerja pemeriksaan, aplikasi ini mengintegrasikan seluruh tahapan audit dalam satu sistem, mulai dari penerimaan klien, penilaian risiko, pelaksanaan prosedur, hingga penyusunan laporan auditor independen. Integrasi tersebut membantu auditor menyusun dokumentasi secara lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan standar profesi. Penggunaan aplikasi ini juga meningkatkan konsistensi penyusunan dokumentasi karena format kertas kerja telah disesuaikan dengan Standar Audit yang berlaku. Di samping itu, proses supervisi dan penelaahan oleh auditor senior maupun partner menjadi lebih mudah karena seluruh tahapan terdokumentasi secara lengkap dan saling terhubung (Daewoo, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, ATLAS merupakan aplikasi yang mendukung penyusunan dokumentasi audit secara sistematis dan terintegrasi sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit serta kualitas hasil pemeriksaan.

2.6.2 Tujuan Penggunaan ATLAS

Menurut G. D. Pradana & Rani (2023), dalam (Vica & Budiwitjaksono, 2025) tujuan penggunaan ATLAS adalah membantu auditor mengidentifikasi area yang memerlukan pemeriksaan lebih

mendalam, mengurangi risiko kesalahan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Selain itu, aplikasi ini membantu proses dokumentasi menjadi lebih terarah, sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku, serta menghasilkan format kertas kerja yang lebih seragam.

Secara umum, tujuan penggunaan ATLAS adalah sebagai berikut :

1. Membantu auditor menyusun kertas kerja pemeriksaan sesuai dengan Standar Audit.
2. Meningkatkan efisiensi pelaksanaan audit melalui dokumentasi yang terstruktur dan terintegrasi.
3. Mengurangi risiko kesalahan dalam penyusunan dokumentasi audit.
4. Mempermudah proses supervisi dan penelaahan (*review*) terhadap pekerjaan auditor.
5. Mendukung penerapan audit berbasis risiko (*risk based audit*).
6. Meningkatkan kualitas dokumentasi sebagai dasar pemberian opini atas laporan keuangan.
7. Mempermudah penyimpanan dan pengarsipan dokumen sehingga dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan.

Dengan tercapainya tujuan tersebut, penggunaan ATLAS diharapkan mampu meningkatkan kualitas hasil audit sekaligus mendukung transformasi digital dalam profesi akuntan publik di Indonesia.

2.6.3 Tahapan Audit Menggunakan ATLAS

Pelaksanaan audit menggunakan ATLAS dilakukan melalui tahapan yang saling berkaitan sesuai dengan Standar Audit. Setiap tahap

dirancang untuk membantu auditor melaksanakan pemeriksaan secara sistematis dan menghasilkan dokumentasi yang lengkap (Falianda, Izza, & Abidin, n.d.):

1. Tahap Pra-Perikatan (*Pre-Engagement*)

Tahap pra-perikatan merupakan proses awal sebelum auditor menerima penugasan. Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap calon klien untuk memastikan bahwa penugasan dapat dilaksanakan secara independen dan sesuai dengan ketentuan profesi.

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi:

- a. Penilaian integritas manajemen
- b. Evaluasi independensi auditor
- c. Penilaian risiko penugasan
- d. Penyusunan surat perikatan audit (*engagement letter*)
- e. Penerbitan surat tugas audit.

Seluruh informasi didokumentasikan pada indeks A1 dalam aplikasi ATLAS.

2. Tahap Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Tahap ini bertujuan mengidentifikasi risiko salah saji material dalam laporan keuangan melalui pemahaman terhadap karakteristik perusahaan, lingkungan usaha, dan sistem pengendalian internal. Pada tahap ini auditor juga:

- a. Memahami karakteristik perusahaan
- b. Melakukan prosedur analitis awal
- c. Menentukan tingkat materialitas

- d. Mengidentifikasi risiko audit
- e. Mengevaluasi pengendalian internal perusahaan.

Hasil penilaian menjadi dasar dalam menentukan prosedur pemeriksaan pada tahap berikutnya. Dokumentasi tahap ini terdapat pada indeks A2.

3. Tahap Respons Risiko (*Risk Response*)

Setelah risiko diidentifikasi, auditor menyusun prosedur pemeriksaan yang sesuai untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai dasar penyusunan kesimpulan.

Beberapa prosedur audit yang dilakukan pada tahap ini meliputi:

- a. Inspeksi dokumen
- b. Observasi
- c. Konfirmasi kepada pihak ketiga
- d. Wawancara
- e. Perhitungan ulang (*recalculation*)
- f. Pelaksanaan kembali (*reperformance*)
- g. Prosedur analitis.

Seluruh hasil pemeriksaan didokumentasikan dalam kertas kerja pada **indeks B**

4. Tahap Penyelesaian dan Pelaporan (*Completing and Reporting*)

Tahap akhir dilakukan sebelum penerbitan laporan auditor independen. Pada tahap ini auditor mengevaluasi seluruh bukti yang telah diperoleh untuk memastikan kecukupan dan ketepatannya sebagai dasar dalam penyusunan opini.

Pada tahap ini auditor melakukan:

- a. Evaluasi kecukupan bukti audit
- b. Penyelesaian dokumentasi audit
- c. Penelaahan kertas kerja pemeriksaan
- d. Penyusunan laporan auditor independen
- e. Pemberian opini audit sesuai dengan hasil pemeriksaan.

Seluruh proses tersebut didokumentasikan pada indeks C. Dengan tahapan yang tersusun secara sistematis, ATLAS membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit, mempermudah supervisi, serta mendukung pengarsipan dokumentasi secara lebih terstruktur.

2.7 Implementasi *Audit Tools and Linked Archive System* (ATLAS) dalam Proses Audit Laporan Keuangan

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, khususnya pada proses penyusunan dokumentasi pemeriksaan. Salah satu bentuk penerapannya adalah penggunaan *Audit Tools and Linked Archive System* (ATLAS) yang mendukung penyusunan kertas kerja pemeriksaan secara digital, terstruktur, dan terintegrasi. Melalui sistem ini, setiap tahapan audit dapat dilaksanakan secara lebih sistematis sesuai dengan Standar Audit yang berlaku (Nursafitri & Andayani, 2021).

Penerapan ATLAS dimulai sejak tahap awal penugasan hingga penyusunan laporan auditor independen. Seluruh proses terdokumentasi dalam satu sistem sehingga memudahkan auditor dalam melakukan perencanaan,

pelaksanaan prosedur, evaluasi bukti, serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Dengan demikian, penggunaan aplikasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pelaksanaan audit, tetapi juga mendukung kualitas dokumentasi yang dihasilkan.

2.7.1 Manfaat Implementasi ATLAS

Penerapan ATLAS memberikan berbagai manfaat bagi auditor maupun Kantor Akuntan Publik dalam mendukung pelaksanaan audit laporan keuangan. Beberapa manfaat tersebut antara lain sebagai berikut (Christin, Sembiring, Roma, & Silalahi, 2026):

1. Meningkatkan efisiensi proses audit

Penyusunan dokumentasi dilakukan secara lebih cepat dan terstruktur sehingga waktu penyelesaian pekerjaan menjadi lebih singkat.

2. Meningkatkan kualitas dokumentasi audit

Penyusunan kertas kerja yang sistematis sehingga memudahkan proses supervisi dan penelaahan

3. Mengurangi risiko kesalahan

Penggunaan format yang telah distandarkan membantu meminimalkan kesalahan dalam penyusunan kertas kerja pemeriksaan.

4. Mempermudah penyimpanan dokumen audit

Seluruh dokumentasi audit tersimpan dalam satu sistem sehingga mudah dicari kembali apabila diperlukan.

5. Mendukung audit berbasis risiko

Auditor dapat lebih mudah menentukan prosedur audit sesuai tingkat risiko yang dihadapi.

6. Meningkatkan kualitas opini auditor

Dokumentasi yang lengkap dan sistematis memberikan dasar yang lebih kuat bagi auditor dalam menyusun opini atas laporan keuangan.

2.7.2 Kendala Implementasi ATLAS

Meskipun memberikan berbagai manfaat, penerapan ATLAS masih menghadapi beberapa kendala dalam praktiknya. Hambatan tersebut dapat memengaruhi efektivitas penggunaan aplikasi apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia maupun sarana yang memadai. Beberapa kendala yang masih sering ditemui antara lain (Sudiman & Dwiharyadi, 2025):

1. Kurangnya pemahaman auditor dalam mengoperasikan aplikasi.
2. Keterbatasan pelatihan mengenai penggunaan ATLAS.
3. Adanya resistensi dari auditor yang telah terbiasa menggunakan metode dokumentasi secara manual.
4. Keterbatasan sarana dan prasarana teknologi pada beberapa Kantor Akuntan Publik.
5. Perlunya pembaruan aplikasi secara berkala agar tetap sesuai dengan perkembangan Standar Audit.

Oleh karena itu, peningkatan kompetensi auditor melalui pelatihan yang berkesinambungan, didukung dengan penyediaan

fasilitas teknologi yang memadai, menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan implementasi ATLAS pada proses audit laporan keuangan.

2.8 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Haniifah & Pramudyastuti (2021)	Analisis Efektivitas Audit Tools and Linked Archive System dalam Menunjang Proses Audit Laporan Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan ATLAS mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit, mempermudah penyusunan kertas kerja pemeriksaan, serta membantu auditor melaksanakan audit sesuai dengan Standar Audit.
2	Izzah & Munandar (2024)	Kajian Literatur Implementasi ATLAS di Kantor Akuntan Publik	Penelitian menunjukkan bahwa implementasi ATLAS memberikan manfaat terhadap efisiensi audit, namun masih terdapat kendala berupa keterbatasan pelatihan dan adaptasi auditor terhadap sistem digital.
3	Vica & Budiwitjaksono (2025)	Penerapan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) ATLAS dalam Proses Audit Laporan Keuangan	Penggunaan KKP ATLAS meningkatkan efisiensi penyusunan dokumentasi audit, menjaga integritas data, serta meningkatkan kualitas audit.
4	Jurnal Riset Akuntansi (2023)	Studi Literatur Kecerdasan Buatan untuk Audit: Kolaborasi atau Ancaman bagi Profesi Auditor	Penelitian menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital mampu meningkatkan efisiensi audit melalui otomatisasi prosedur audit dan pengolahan data.
5	Tatsuya & Bambang Haryadi (2020)	Analisis Faktor Penerimaan Aplikasi Audit Tools and Linked Archive System (ATLAS)	Penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan kesesuaian teknologi memengaruhi penerimaan auditor terhadap penggunaan ATLAS.

Tabel 2.1 Penelitian Dahulu